

# Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta

**Rianny Puspita dan Dikdik Baehaqi Arif**

*Program Studi PPKn Universitas Ahmad Dahlan*

*Jl. Pramuka No. 42, Sidikan Yogyakarta 55161*

*E-mail: riannypuspita@yahoo.com dan dikdikbaehaqi@ppkn.uad.ac.id*

## ABSTRAK

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Dalam masyarakat majemuk, tersimpan kekuatan yang sangat besar berupa beragam adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa yang berjenis-jenis yang menjadi pengikat kelompok-kelompok masyarakat untuk bersatu menentang penjajahan. Namun, kemajemukan juga memicu timbulnya konflik antar kelompok masyarakat. Dalam lembaga pendidikan rentan akan munculnya konflik yang berkaitan dengan deskriminasi etnis, gender, budaya dan paham agama. Penelitian ini berusaha mengetahui peranan lembaga pendidikan yang memiliki siswa-siswi yang berbeda latar belakang terutama fokus pada implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah sebagaimana direkomendasikan oleh UNESCO. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus, lokasi penelitian di lakukan di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, subyeknya ialah kepala sekolah, guru, dan siswa-siswa di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di sekolah, peran guru dalam proses pembelajaran yang mengembangkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dan praktik siswa dalam mengimplementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika telah diimplementasikan di lingkungan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta melalui kebijakan kepala sekolah yang mendukung nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, proses pembelajaran di kelas PPKn yang memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan diterapkan dalam perilaku keseharian siswa yang menjunjung nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.

**Kata kunci:** *Implementasi, Nilai, Bhinneka Tunggal Ika, multikultural*

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural societies*). “Masyarakat ini terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik” (Nasikun, 2012:35). Kemajemukan masyarakat Indonesia tersebut memiliki ciri-ciri. Lebih lanjut Nasikun (2012:34) menjelaskan, bahwa:

Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya

kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Dalam mengelola masyarakat yang majemuk diperlukan sebuah upaya. “Upaya mengelola masyarakat Indonesia yang majemuk tidak bisa diterima begitu saja (*taken for granted*) atau hanya coba-coba (*trial and error*)” (Azra, 2006:153). Tetapi sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, terintegrasi dan berkesinambungan. Hal itu perlu dilakukan karena kemajemukan yang ada di Indonesia sebenarnya sudah ada dengan sendirinya, bukan karena hadirnya para pendatang baru yang berlainan etnik, ras atau agama, melainkan karena sejak dulu masyarakat Indonesia memang plural sekaligus heterogen. Itulah sebabnya, para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) menjadikan sasanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara Indonesia.

Untuk menunjukkan beberapa contoh potensi konflik di Indonesia, kita dapat menyebut konflik yang pernah terjadi antara warga Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah yang terjadi pada 18 Februari 2001 berkembang menjadi konflik antar etnis yang merenggut banyak korban jiwa. Dalam Wikipedia Indonesia (2001) menjelaskan “lebih dari 500 warga yang meninggal dan lebih dari 100.000 warga Madura yang kehilangan tempat tinggal.” Masih terjadi pula diskriminasi terhadap gender, dimana korbannya adalah perempuan. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perempuan (2014), menjelaskan “Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2013 telah mengabulkan permohonan cerai gugat akibat poligami sebanyak 18.955 kasus, dengan alasan poligami.” Poligami telah menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi para istri dan merupakan akar kekerasan terhadap perempuan.

Kemajemukan yang terjadi di masyarakat juga terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Paling tidak keragaman latar belakang siswa di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia terdapat pada paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, dan asal daerahnya (perkotaan atau pedesaan). Hal ini berdasarkan pada data bahwa di Indonesia terdapat lebih

dari 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (*lingua franca*), 13.000 pulau, dan 6 agama resmi yang diakui negara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti di SMA Muhammadiyah (SMAM) 5 Yogyakarta, bahwa dilihat dari latar belakang daerah asal siswa yang bersekolah di SMA ini tidak hanya berasal dari Yogyakarta, melainkan ada beberapa siswa yang berasal dari daerah di luar Yogyakarta, seperti dari Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung dan Maluku Utara. Saat ini, siswa yang berasal dari luar daerah Yogyakarta yang bersekolah di SMAM 5 Yogyakarta sekitar 10% dari jumlah seluruh siswanya. Perbedaan tersebut dapat membuat mereka saling belajar untuk mengetahui budaya-budaya luar yang dibawa oleh teman-teman mereka. Perbedaan itu membantu siswa SMAM 5 Yogyakarta lebih mengenal berbagai macam bahasa, budaya, adat istiadat, makanan khas dari daerah yang berbeda. Namun, di sisi lain kemajemukan tersebut rentan timbulnya konflik dan keretakan di antara mereka, seperti ejekan atau perkelahian. Tantangan bagi penyelenggara pendidikan di sana adalah bagaimana memainkan perannya dalam merekatkan berbagai perbedaan di antara siswa agar tetap memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara Indonesia yang majemuk.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Kajian tentang Kemajemukan Masyarakat Indonesia**

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi. “Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 237.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) jiwa yang tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2012).” Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan “negara persatuan” dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali.

Ketentuan tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A yang berbunyi: “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.” Selain itu, dalam UUD 1945 sebelum diubah, pengakuan atas keberagaman dicantumkan pada Pasal 18 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Kesadaran akan kebhinnekaan juga dimuat dalam rumusan Pasal 25A UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” Pengakuan akan keberagaman, juga tercantum pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan tersebut menggambarkan keanekaragaman agama di Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 32 UUD 1945 juga diatur berdasarkan pada keanekaragaman budaya di Indonesia. Pasal ini merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Pertama, menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh Negara. Kedua, mengenai tugas negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah upaya negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

## **2. Kajian tentang Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika**

### **a. Hakikat Nilai**

Nilai dalam bahasa Inggris adalah *value* yang diartikan sebagai “harga, penghargaan atau taksiran, maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu (Kaelan, 2009:123).” Sedangkan menurut Winarno (2007:3) “nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia.” Nilai adalah sesuatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentuan tingkah laku manusia.

Walter G. Everet (Kaelan, 2009:176) menggolongkan nilai-nilai manusiawi ke dalam delapan kelompok yaitu:

- 1) Nilai-nilai ekonomis (ditujukan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli).
- 2) Nilai-nilai kejasmanian (membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan).
- 3) Nilai-nilai hiburan (nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan).
- 4) Nilai-nilai sosial (berasal mula dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan).
- 5) Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan).
- 6) Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni).
- 7) Nilai-nilai keagamaan.

### **b. Hakikat dan Nilai Bhinneka Tunggal Ika**

Dalam masyarakat Indonesia yang plural, tersimpan kekuatan yang sangat besar berupa beragam etnis, budaya dan paham keagamaan. Masyarakat yang plural tersebut telah ada sejak dulu, seperti yang diungkapkan oleh Kusumohamidjojo (2000:45), bahwa:

Para pendiri negara (*founding fathers*) memahami betul konstelasi masyarakat Indonesia yang plural dan sekaligus juga heterogen telah menjadikan ujar-ujar Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bagi Negara Republik Indonesia.

Indonesia memiliki banyak keragaman, hal itu terlihat dari segi bahasa, budaya, agama, aspirasi politik dan kemampuan ekonomi. Menurut Kusumohamidjojo (2000:45) “negara bangsa Indonesia terdiri atas sejumlah kelompok-kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain yang masing-masing

plural dan sekaligus juga heterogen.” Realitas pluralitas dan heterogenitas tersebut tergambar dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun Indonesia adalah berbhinneka, tetapi terintergrasi dalam kesatuan seperti yang diungkapkan oleh Kansil (2011:171), yaitu:

Penduduk Indonesia adalah beraneka ragam, terdiri atas: suku bangsa (10.068), bahasa daerah (615), lagu daerah (485), agama (Hindu, Budha, Islam, Katolik, Protestan, dan Konghucu) dan ras (asal keturunan), namun tetap merupakan satu bangsa, ialah bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia.

Semboyan ini tertulis di dalam lambang Negara Indonesia, yaitu Burung Garuda Pancasila. Pada kaki burung garuda itu terpampang dengan jelas tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” dikutip dari kitab Kakawin Sutasoma milik Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk sekitar abad ke-14 (1350-1389) yang berbunyi “*Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa*, “ artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.”. Semboyan tersebut kemudian menjadi prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit untuk menyatukan keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Istilah tersebut tercantum dalam bait 5 pupuh 139, yang berbunyi:

*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa,  
Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen,  
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,  
Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

Terjemahan :

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, namun bagaimana kita bisa Mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memangberbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua.  
(Bhineka Tunggal Ika tan Hana Dharma Mangrawa)  
(Tantular, 2009:504-505).

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai

dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia. Menurut pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa:

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

c. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar di dalam KTSP maupun dalam Kurikulum 2013, Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memuat beberapa konsep kajian yang menjadi nilai inti kebhinnekaan, seperti yang diungkapkan oleh Arif (2013:7) yaitu “keberagaman etnis dan ras, membangun keberagaman inklusif, kesadaran budaya multikultural, membangun sikap sensitifitas gender, dan membangun toleransi.”

1) Kelompok etnis dan Ras

Perkataan etnis berasal dari kata *ethnos* yang dalam bahasa Yunani berarti “masyarakat”. Menurut Arif (2013:7) “etnis adalah golongan masyarakat yang didefinisikan secara sosial berdasarkan berbagai macam karakteristik kulturalnya.” Lebih lanjut Arif (2013:7) menjelaskan bahwa:

Karakteristik-karakteristik kultural ini dapat berupa bahasa, agama, asal suku atau asal negara, tata cara hidup sehari-hari, makanan pokok, cara berpakaian atau ciri-ciri kultural yang lainnya. Etnis terbentuk berdasarkan definisi sosial dan bukan merupakan definisi yang didasarkan pada faktor keturunan atau biologis.

2) Membangun Keberagaman Inklusif

Pengertian dasar tentang agama dapat dikemukakan baik dari agama itu sendiri, dari para Antropolog maupun dari para sarjana dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Menurut agama-agama *samawi* atau agama monoteistik, agama adalah sebuah pengakuan terhadap adanya Tuhan dan sebagai wadah untuk penyerahan diri terhadap-Nya.

Permasalahan yang muncul dari realitas kebersamaan ini adalah konflik keagamaan, baik di dalam satu agama, atau pun antar agama. “Salah satu faktor

utama konflik keagamaan adalah adanya paradigma keberagaman masyarakat yang masih eksklusif (Yaqin, 2005:56).” Pemahaman keberagaman ini membentuk pribadi yang antipati terhadap pemeluk agama lainnya. Pribadi yang tertutup dan menutup ruang dialog dengan pemeluk agama lainnya. Pribadi yang selalu merasa hanya agama dan alirannya saja yang paling benar sedangkan agama dan aliran keagamaan lainnya adalah salah dan bahkan dianggap sesat.

Karena itu, “perlu dibangun pemahaman keberagaman yang lebih inklusif-pluralis, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, substantif, dan aktif sosial (Yaqin, 2005:56-57).” Pemahaman keberagaman seperti itu dapat dibangun melalui pendidikan, media massa, maupun melalui interaksi sosial yang intens.

### 3) Kesadaran Budaya Multikultur

Secara harfiah, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Demikian kebudayaan itu dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal (Koentjaraningrat, 1994:9).” Mempertegas pendapatnya, Koentjaraningrat (1994:181) mengemukakan adanya sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai perkembangan dari majemuk budi-daya, yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka membedakan budaya dari kebudayaan. Demikianlah budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa itu. Sedangkan dalam definisi yang disusun oleh Sir Edward Taylor (Arif, 2013:12) kebudayaan disebut “sebagai kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat. Hal tersebut dipertegas oleh pendapat Soekanto (Arif, 2013:12) yang menyatakan bahwa budaya “terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, yang mencakup segala cara atau pola-pola berfikir, merasakan dan bertindak.”

#### 4) Membangun Sikap Sensitifitas Gender

Gender adalah bagian dari sebuah konstruksi sosial terhadap apa yang disebut *maskulin* dan *feminim*. Gender tidak bisa dipisahkan dengan budaya, karena gender justru dibentuk oleh budaya. Ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial budaya masyarakat tentang gender akan berbeda-beda. Gender tentu berbeda dengan seks. Menurut L Margaret Andersen (Yaqin, 2005:115) “ia lebih mengacu kepada identitas genetis atau fisik seseorang.” Secara biologis, seks biasanya digunakan untuk menentukan apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan. Arif (2013:17) juga menambahkan bahwa “peran sekolah sebagai lembaga pendidikan juga tidak kalah penting dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.”

#### 4) Membangun Toleransi

Nilai penting dari kebhinnekaan sebagai keniscayaan adalah membangun sikap toleransi. “Toleransi berasal dari bahasa Latin “*tolerantia*”, yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran (Misrawi, 2007:181).” Toleransi dapat dipahami sebagai sikap atau gagasan yang menggambarkan pelbagai kemungkinan.

Membangun toleransi harus menjadi prioritas, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen. Pemahaman atas pentingnya toleransi mesti menjadi keniscayaan dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik. Hanya dengan cara itu, kehidupan ini akan lebih bermakna dan bermanfaat. “Secara sosiologis, membangun masyarakat yang toleran tidak semudah membalikkan kedua belah tangan, karena sejarah manusia pada hakikatnya adalah sejarah intoleransi (Misrawi, 2007:178).” Pendapat misrawi tersebut, menunjukkan bahwa membangun toleransi bukanlah hal yang mudah, maka dari itu dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh.

Menurut Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2011:22), nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yakni:

- 1) Nilai Toleransi, merupakan suatu sikap yang mau memahami orang lain sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan baik;
- 2) Nilai Keadilan, merupakan suatu sikap mau menerima haknya dan tidak mau mengganggu hak orang lain;

- 3) Nilai Gotong Royong/kerjasama, merupakan suatu sikap untuk membantu pihak/orang yang lemah agar sama-sama mencapai tujuan.

### **3. Kajian tentang Teori Interaksi Sosial dan Teori Konflik sebagai dasar Implementasi Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika**

#### **a. Teori Interaksi Sosial**

Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. “Bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial (proses sosial) (Syarbaini, 2009:25).” Oleh karena itu interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktifitas-aktifitas sosial.

Secara teoritis, setidaknya-tidaknya ada dua syarat terjadinya interaksi sosial yakni: “*Pertama*, ada kontak sosial, yaitu usaha pendekatan pertemuan fisik dan rohaniah. *Kedua*, ada komunikasi, yaitu usaha penyampaian informasi kepada manusia lain” (Syarbaini, 2009:27-28).

Interaksi sosial dapat mengarah kepada proses asimilasi. Hal ini dapat berupa:

- 1) Interaksi sosial yang bersifat saling ada pendekatan.
- 2) Interaksi sosial yang bersifat langsung atau primer.
- 3) Interaksi sosial yang lancar dan tidak ada hambatan atau batas.
- 4) Interaksi sosial yang sering, intensif dan sehari-hari (Syarbaini, 2009:27-28).

Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (*Cooperation*), akomodasi (*accommodation*), persaingan (*competition*), dan pertikaian (*conflict*). Menurut Gillin dan Gillin (Syarbaini, 2009:27-28), ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yakni: *pertama*, proses yang asosiatif yaitu suatu proses sosial yang mengindikasikan adanya gerak pendekatan atau penyatuan. Bentuk-bentuk proses sosial Asosiatif, yaitu kerjasama, komodasi dan asimilasi serta akulturasi. *Kedua*, proses yang disosiatif yaitu proses yang sosial yang mengindikasikan pada gerak ke arah perpecahan.

Bentuk-bentuk proses sosial dissosiatif, yaitu persaingan, pertikaian dan kontravensi.

b. Teori Konflik

Konflik adalah kenyataan yang melekat pada masyarakat. Adanya tertib sosial seperti adanya sistem nilai yang telah disepakati bersama, tidak secara otomatis dapat menghilangkan konflik. Kenyataan adanya konflik ini, menurut David Lockwood (Soelaeman, 2000:56) dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1) Setiap struktur sosial di dalam dirinya mengandung konflik-konflik dan kontradiksi-kontradiksi yang bersifat internal, sehingga dapat menjadi sumber perubahan sosial.
- 2) Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar tidak selalu bersifat mengatur.
- 3) Sistem sosial dalam waktu yang panjang dapat mengalami konflik-konflik sosial yang bersifat melekat (kronis).
- 4) Perubahan sosial yang terjadi dalam suatu sistem sosial tidak selamanya bersifat perlahan (gradual), tetapi dapat pula terjadi secara revolusioner.

Pandangan mengenai konflik diatas, berdasarkan anggapan bahwa masyarakat senantiasa selalu dalam keadaan berubah . Perubahan sosial yang terjadi dalam rangka sintesa dari tesa-tesa yang berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. Proses sintesa yang terjadi merupakan ajang terjadinya konflik. Oleh sebab itu pandangan pendekatan konflik terhadap masyarakat bersumber dari anggapan dasar sebagai berikut:

- 1) Perubahan sosial merupakan proses yang melekat pada setiap masyarakat.
- 2) Konflik merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat.
- 3) Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan tertentu bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial.
- 4) Terjadinya integrasi masyarakat, berada pada penguasa atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang lainnya (Soelaeman, 2000:66).

Walaupun teori konflik menganalogikan masyarakat dengan medan pertempuran yang tidak habis-habisnya, tetapi teori konflik memberikan sumbangan bagi integrasi.

#### **4. Penerapan Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di Sekolah**

Usaha untuk mencapai dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang dapat menghargai perbedaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka dari itu dibutuhkan upaya sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan. Selain itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia supaya bisa sejajar dengan negara-negara lain, pendidikan harus dapat memberi pengetahuan agar masyarakat dapat menghargai perbedaan di antara komunitas kultural atau kelompok di masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda agar rasa kesatuan dan persatuan terhadap bangsa dan negara semakin meningkat.

Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk menyiapkan generasi muda penerus bangsa demi menunjang perannya di masa yang akan datang karena pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. Saat ini, hampir tidak ada manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitas hidupnya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Peneliti mengambil enam orang narasumber yang dipilih berdasarkan asal pulau yang berbeda di Indonesia. Objek penelitian adalah kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di sekolah, peran guru dalam proses pembelajaran yang mengembangkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di sekolah, dan praktik siswa dalam mengimplementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data dilakukan yaitu mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta**

SMAM 5 Yogyakarta menerima siswa dari luar daerah Yogyakarta, dengan tidak ada batasan terhadap siswa-siswa yang berasal dari luar Yogyakarta itu. Sekolah tidak menetapkan syarat-syarat khusus kepada para siswanya yang berasal dari luar Yogyakarta yang ingin mendaftar sebagai siswa baru di SMAM 5 Yogyakarta. Siswa yang berasal dari Yogyakarta maupun siswa yang berasal dari luar Yogyakarta diperlakukan sama.

Pada awalnya, siswa SMAM 5 Yogyakarta terdiri atas perempuan semua. Menurut para pendiri SMAM 5 Yogyakarta, pada awalnya memang dikhususkan sebagai sekolah putri. Namun, seiring berjalannya waktu dan siswa yang mendaftar cenderung sedikit, maka diputuskan untuk menerima siswa laki-laki. Dalam menerapkan sikap toleransi antar sesama siswa, sekolah berpacuan pada nilai-nilai agama. Dalam agama Islam, tidak ada pembedaan antara umat yang satu dan umat yang lainnya, semua umat dipandang berdasarkan ketaatan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang penduduknya mayoritas etnis Jawa, karena itu SMAM 5 Yogyakarta menjadikan bahasa Jawa sebagai muatan lokal. SMAM 5 Yogyakarta juga memasukkan kebudayaan Jawa dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Karawitan. SMAM 5 Yogyakarta adalah bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah, dimana di dalamnya dimasukkan materi pelajaran kemuhammadiyah. Sekalipun demikian, SMAM 5 Yogyakarta tidak membatasi bahwa siswa yang bersekolah di SMAM 5 Yogyakarta harus berasal dari keluarga Muhammadiyah. Walaupun begitu, belum ada siswa yang berasal dari keluarga selain Islam yang bersekolah di sini.

### **2. Proses Pembelajaran PPKn yang Mengembangkan Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika**

Sebelum proses pembelajaran dimulai, guru memimpin para siswa untuk membaca Al Qur'an antara 10-15 menit. Proses pembelajaran dibagi dalam tiga tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dalam

kegiatan pendahuluan, guru memulainya dengan mengucapkan salam kepada siswa. Dalam kegiatan inti, guru menjelaskan metode pembelajaran yang digunakan (biasanya siswa diajak untuk mencari materi yang ditentukan oleh guru secara individu).

Sekalipun latar belakang siswanya berbeda-beda, tetapi guru tidak membedakan perlakuan kepada mereka. Sebagai contoh, dalam pembagian anggota kelompok diskusi, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok yang didasarkan atas urutan absen mereka atau dengan cara meminta siswa untuk berhitung sampai nomor tertentu.

Guru mengakui bahwa masih ada kendala dalam proses pembelajaran. Kendala itu antara lain dalam membangun minat siswa dan membangun sikap toleransi antar siswa. Masih ada siswa yang kurang memiliki minat belajar, dan tidak memiliki sikap keberagaman yang inklusif. Dalam proses pembelajaran, Guru tidak melakukan diskriminasi terhadap siswanya yang berbeda latar belakang. Guru berusaha merangkul semua agar terjalin hubungan yang demokratis dan menyenangkan saat proses pembelajaran berlangsung.

Dalam kegiatan penutup, guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan tentang apa yang telah mereka pelajari dan memberi Pekerjaan Rumah (PR) kepada siswa. Proses pembelajaran diakhiri dengan mengucapkan salam dan siswa membalas salam tersebut.

### **3. Perilaku Keseharian Siswa yang Mengembangkan Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika**

Ketika mendaftar menjadi siswa baru di SMAM 5 Yogyakarta, para siswa yang berasal dari luar daerah Yogyakarta mengakui bahwa tidak ada ketentuan khusus yang harus mereka penuhi selain syarat-syarat administratif siswa baru yang sama dengan teman-temannya yang lain. Namun dalam perkembangan selanjutnya, para siswa yang berasal dari luar daerah Yogyakarta mengalami beberapa kendala dalam bersosialisasi dengan teman-temannya. Hal itu disebabkan oleh perbedaan bahasa, ide dan perilaku.

Selama bersekolah di SMAM 5 Yogyakarta, para siswa tidak pernah memilih-milih teman karena faktor etnis, budaya, gender ataupun paham agama.

Di dalam berinteraksi dengan teman-teman, para siswa mengakui bahwa masih terjadi konflik antara diri mereka dengan teman-teman yang lain. Namun, sejauh ini mereka telah menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas.

Tentang perlakuan guru di kelas, para siswa menjelaskan bahwa mereka diperlakukan secara adil. Guru memperlakukan semua siswanya dengan perlakuan yang sama. Walaupun begitu, siswa dari luar daerah atau dari luar keluarga Muhammadiyah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan sekolah yang memasukkan Kemuhammadiyah sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. Kesulitan yang ditemui antara lain pada aspek tatacara ibada praktis, seperti tatacara shalat yang dipraktikkan oleh Muhammadiyah. Kesulitan lain yang mereka alami adalah adanya pelajaran bahasa Jawa yang tidak secara maksimal dapat mereka ikuti, karena mereka tidak mengerti bahasa Jawa.

## **KESIMPULAN**

Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika telah diimplementasikan di lingkungan SMAM 5 Yogyakarta melalui kebijakan kepala sekolah yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, proses pembelajaran di kelas PPKn yang memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan tampak dalam perilaku keseharian siswa yang menjunjung nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Secara khusus, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan SMAM 5 Yogyakarta, telah disusun berbagai kebijakan, yaitu bahwa sekolah bersifat terbuka dalam penerimaan siswa baru, memberikan peluang dan kesempatan yang sama untuk siswa yang berasal dari luar daerah dalam penerimaan siswa baru, membangun prinsip toleransi di antara sesama siswa, perlakuan yang adil terhadap siswa yang berbeda-beda latar belakang, membangun kesadaran sensitifitas gender, membangun keberagaman inklusif, dan membangun kesadaran multikultur di kalangan siswa
2. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika telah diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran PPKn, guru membangun keberagaman

inklusif di kelas, rasa toleransi, tidak membedakan latar belakang siswanya, berusaha merangkul semua paham keagamaan supaya terjalin hubungan yang demokrasi dan menyenangkan saat proses pembelajaran.

3. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika telah diimplementasikan dengan baik oleh siswa dalam perilaku keseharian mereka di sekolah. Mereka dapat berinteraksi dengan siswa tanpa membedakan latar belakang mereka. Sekalipun muncul konflik, tetapi konflik itu dilatarbelakangi oleh ego mereka sendiri, bukan karena perbedaan etnis, budaya, gender maupun paham keagamaan. Mereka juga dapat membangun sikap toleransi antar teman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, D.B., & Zuliyah, S. (2013). *Nilai-nilai Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dala Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penerapan Kurikulum 2013 MGMP PKn SMP Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Program Studi PPKn.
- Arif, D. B. (2008). *Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap Kompetensi Kewarganegaraan*. Universitas Pendidikan Indonesia, Sekolah Pascasarjana. Bandung: SPs UPI.
- Azra, A. (2006). *Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme*. *Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila "Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: BrightenInstitute.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2012). "Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010". <http://www.bps.go.id/int/index.php/publikasi/20130411001>
- Kaelan. (2009). *Filasafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. (2011). *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Komisi Nasional Perempuan. (2014). "SMS Pers Merespon Keputusan Wali Kota Surabaya Memecat PNS Pelaku Poligami". <http://www.komnasperempuan.or.id/2014/03/sms-pers-merespon-keputusan-walikota-surabaya-memecatpns-pelaku-poligami/>
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.

- Misrawi, Z. (2007). *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah.
- Nasikun. (2012). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soelaeman, M. M. (2000). *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Refika.
- Syarbaini, S. & Rusdiyanta. (2009). *Dasar-dasar sosiologi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Tantular, M. (2009). *Kakawin Sutasoma*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Wikipedia. (2001). "Konflik sampit". [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Konflik\\_Sampit](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Konflik_Sampit)
- Winarno. (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yaqin, M. A. (2005). *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.